



*Rudy C Tarumingkeng: Ketimpangan Ekonomi Indonesia - Menurun di
Data, Namun Masih Terasa di Lapangan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

1 April 2026

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA: MENURUN DI DATA, NAMUN MASIH TERASA DI LAPANGAN

Abstrak

Makalah ini membahas paradoks ketimpangan ekonomi Indonesia pada awal 2026: indikator distribusi pengeluaran menunjukkan perbaikan, tetapi pengalaman ketimpangan masih tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rasio Gini pengeluaran Indonesia pada September 2025 turun menjadi 0,363, lebih rendah daripada 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Pangsa pengeluaran 40 persen penduduk terbawah juga naik menjadi 19,28 persen. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Namun, data lain menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih jauh lebih tinggi daripada perkotaan, yaitu 10,72 persen berbanding 6,60 persen; ketimpangan di perkotaan tetap lebih lebar; pertumbuhan ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Jawa; dan kualitas pekerjaan belum cukup membaik. Bank Dunia menilai bahwa porsi pekerjaan kelas menengah di Indonesia justru turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023, hampir 60 persen pekerja masih berada di sektor informal, dan sekitar 70 persen pekerja berada di sektor-sektor dengan produktivitas pendapatan rendah. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh pada

November 2025 baru sekitar Rp3,33 juta, sementara inflasi tahunan sempat mencapai 4,76 persen pada Februari 2026 sebelum turun menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. Makalah ini berargumen bahwa ketimpangan yang “menurun di data” terutama merujuk pada ketimpangan pengeluaran, sedangkan ketimpangan yang “masih terasa di lapangan” berkaitan dengan kualitas pekerjaan, biaya hidup, kerentanan rumah tangga, ketimpangan spasial, serta konsentrasi pertumbuhan pada sektor-sektor bernilai tambah lebih rendah. Dengan demikian, Indonesia tidak sedang menghadapi kegagalan pertumbuhan, melainkan persoalan transmisi: pertumbuhan dan perbaikan distribusi agregat belum sepenuhnya berubah menjadi rasa aman ekonomi yang luas dan merata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: *ketimpangan ekonomi, rasio Gini, kemiskinan, pasar kerja, informalitas, daya beli, Indonesia 2026*

Ketimpangan Ekonomi Indonesia: Menurun di Data, Namun Masih Terasa di Lapangan

Pendahuluan

Dalam studi pembangunan, ketimpangan bukan sekadar soal perbedaan pendapatan atau pengeluaran antarindividu. Ketimpangan juga menyangkut perbedaan akses terhadap pekerjaan yang baik, layanan publik yang bermutu, perlindungan sosial, kesempatan pendidikan, dan kapasitas untuk bertahan dari guncangan ekonomi. Karena itu, sebuah negara dapat memperlihatkan perbaikan dalam statistik distribusi, tetapi masyarakatnya masih merasakan ketimpangan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Situasi semacam inilah yang tampak pada Indonesia menjelang 2026. Data resmi menunjukkan ketimpangan pengeluaran

membaik, kemiskinan menurun, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Namun pada level rumah tangga, perasaan sempit, rapuh, dan tertinggal masih cukup kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara resmi, rasio Gini pengeluaran Indonesia pada September 2025 turun menjadi 0,363. Angka ini lebih rendah daripada 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Ketimpangan perkotaan juga turun menjadi 0,383, sedangkan ketimpangan perdesaan turun menjadi 0,295. Selain itu, menurut ukuran Bank Dunia yang disajikan BPS, pangsa pengeluaran 40 persen penduduk terbawah meningkat menjadi 19,28 persen secara nasional; di perkotaan 18,32 persen, dan di perdesaan 22,09 persen. Secara statistik, ini adalah perkembangan yang positif. Ia menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran rumah tangga tidak bergerak ke arah yang lebih timpang, melainkan sedikit lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada saat yang sama, profil kemiskinan juga membaik. BPS mencatat bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,49 juta orang. Ini adalah capaian penting. Akan tetapi, di balik angka nasional tersebut, terdapat ketimpangan spasial yang tidak kecil: kemiskinan di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Artinya, perbaikan agregat nasional belum menghapus jurang pengalaman kesejahteraan antarwilayah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Lebih jauh lagi, struktur pertumbuhan Indonesia sendiri masih menunjukkan konsentrasi yang kuat. Perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen dengan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta, tetapi kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa memang tumbuh paling tinggi, tetapi pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah ekonomi tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan itu membuka kesempatan yang cukup luas bagi rumah tangga di luar pusat-pusat pertumbuhan. Ketika satu wilayah sangat

dominan dan kualitas pekerjaan belum membaik secara luas, maka wajar bila ketimpangan masih terasa meskipun indikator distribusi pengeluaran membaik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: mengapa ketimpangan ekonomi Indonesia dapat menurun dalam data, tetapi masih terasa di lapangan? Jawaban yang diajukan di sini adalah bahwa data yang membaik tersebut terutama menangkap **ketimpangan pengeluaran**, sedangkan pengalaman sosial masyarakat sangat dipengaruhi juga oleh **ketimpangan kesempatan, ketimpangan kualitas pekerjaan, ketimpangan wilayah, dan ketimpangan kemampuan bertahan dari tekanan biaya hidup**. Dengan kata lain, indikator agregat sedang menunjukkan perbaikan, tetapi fondasi sosial-ekonominya belum cukup kuat untuk membuat mayoritas rumah tangga merasa benar-benar aman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan yang Menurun dalam Data: Apa yang Sesungguhnya Membaik?

Langkah pertama untuk membaca paradoks ini adalah mengakui bahwa memang ada perbaikan yang nyata. Rasio Gini pengeluaran September 2025 sebesar 0,363 menandai penurunan 0,012 poin dari Maret 2025 dan 0,018 poin dari September 2024. Ini berarti distribusi pengeluaran rumah tangga, setidaknya menurut ukuran statistik yang lazim dipakai, menjadi sedikit lebih merata. Di tingkat perkotaan dan perdesaan, pola penurunannya juga konsisten. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang bergerak ke arah konsentrasi pengeluaran yang makin tajam. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perbaikan itu juga tampak dalam ukuran pangsa pengeluaran 40 persen terbawah. Pada September 2025, pangasanya naik menjadi 19,28 persen dari 18,65 persen pada Maret 2025. Di perkotaan, pangsa ini naik dari 17,64 persen menjadi 18,32 persen; di perdesaan dari 21,75 persen menjadi 22,09 persen. Dengan demikian, kelompok bawah memang menerima porsi pengeluaran yang sedikit lebih besar dibanding beberapa bulan

sebelumnya. Ini memperkuat kesan bahwa secara agregat, distribusi pengeluaran mengalami perbaikan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Selain itu, kemiskinan juga menunjukkan tren menurun. Persentase penduduk miskin turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin juga menurun dari 23,85 juta menjadi 23,36 juta orang. Ini berarti bahwa sebagian rumah tangga memang mengalami perbaikan kondisi ekonomi sampai mampu bergerak ke atas garis kemiskinan. Secara statistik, kemajuan ini tidak boleh diremehkan. Dalam pembangunan, setiap penurunan kemiskinan merefleksikan perubahan nyata pada konsumsi minimum rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di belakang perbaikan distribusi dan kemiskinan itu, fondasi makro juga relatif stabil. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 2024 yang tumbuh 5,03 persen. PDB per kapita naik menjadi Rp83,7 juta atau sekitar USD 5.083,4. Komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen, tertinggi di antara komponen pengeluaran. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami stagnasi makro. Sebaliknya, mesin pertumbuhan masih berjalan. Dalam logika pembangunan klasik, kondisi semacam ini seharusnya mendukung perbaikan distribusi dan penurunan kemiskinan, dan memang itulah yang tampak di statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bila pembacaan dihentikan pada titik ini, kesimpulan yang muncul akan cenderung optimistis: ketimpangan membaik, kemiskinan menurun, pertumbuhan terjaga. Namun, justru pada titik inilah makalah ini memulai persoalan utamanya. Sebab, data yang membaik tersebut belum cukup untuk menjelaskan mengapa masyarakat masih merasakan ketimpangan secara konkret. Untuk itu, kita harus masuk ke lapisan berikutnya: apa yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh statistik distribusi pengeluaran.

Mengapa Ketimpangan Masih Terasa di Lapangan?

1. Karena yang menurun terutama adalah ketimpangan pengeluaran, bukan seluruh dimensi ketimpangan

Hal pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa rasio Gini yang dirilis BPS adalah **rasio Gini pengeluaran**. Ia sangat berguna, tetapi tidak identik dengan seluruh pengalaman ketimpangan. Pengeluaran yang sedikit lebih merata tidak serta-merta berarti aset, keamanan kerja, kualitas pekerjaan, akses layanan, dan mobilitas sosial juga membaik dengan kecepatan yang sama. Di sinilah jarak pertama antara “data” dan “lapangan” terbentuk. BPS menunjukkan pengeluaran lebih merata; tetapi kehidupan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pengeluaran saat ini, melainkan juga oleh apa yang mereka miliki, jenis pekerjaan yang mereka jalani, dan seberapa aman masa depan ekonomi mereka. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Laporan Bank Dunia tahun 2026 tentang pertumbuhan dan pekerjaan Indonesia membantu menjelaskan sisi yang tidak tertangkap itu. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pangsa pekerjaan kelas menengah justru turun dari 14 persen pada 2019 menjadi hanya 8,4 persen pada 2023. Bank Dunia mengaitkan perkembangan ini dengan akumulasi sumber daya pada manufaktur dan jasa bernilai lebih rendah yang terutama menciptakan pekerjaan berkeahlian rendah. Artinya, perekonomian memang tetap tumbuh, tetapi struktur pertumbuhannya belum cukup menghasilkan pekerjaan yang mampu memperluas kelas menengah secara kuat. Dalam kondisi seperti ini, ketimpangan dapat membaik di pengeluaran, tetapi rasa “naik kelas” ekonomi justru melemah.

2. Karena pekerjaan ada, tetapi pekerjaan yang baik belum cukup banyak

Data pasar kerja Indonesia menampilkan paradoks yang mirip. BPS mencatat jumlah penduduk bekerja pada November 2025 mencapai 147,91 juta orang, naik 1,371 juta orang dari Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,74 persen. Dari sisi kuantitas, ini merupakan sinyal positif: pekerjaan bertambah dan pengangguran menurun. Namun, BPS juga mencatat rata-rata upah buruh pada November 2025 baru sekitar

Rp3,33 juta. Ini berarti bahwa persoalan pasar kerja Indonesia bukan semata kekurangan kerja, melainkan juga kualitas pendapatan dari kerja itu sendiri. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia mempertegas poin ini. Menurut laporan *Indonesia Country Growth and Jobs Report*, hampir 60 persen pekerja Indonesia masih berada dalam pekerjaan informal, yang berarti keamanan kerja dan pertumbuhan pendapatan mereka terbatas. Laporan yang sama juga menyatakan bahwa sekitar 70 persen pekerja berada di sektor-sektor yang menghasilkan kurang dari Rp8 juta per pekerja per bulan. Lebih jauh lagi, penciptaan pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir terkonsentrasi pada sektor-sektor berupah rendah, terutama perdagangan besar dan eceran serta pertanian, yang bersama-sama menyumbang lebih dari separuh pekerjaan baru. Jadi, ketimpangan "terasa" karena banyak orang memang bekerja, tetapi tidak dalam pekerjaan yang cukup aman, cukup produktif, atau cukup berpendapatan untuk menciptakan rasa maju yang nyata.

Dengan kata lain, yang dirasakan masyarakat bukan hanya pertanyaan "apakah saya bekerja?", melainkan "apakah kerja saya cukup untuk hidup layak dan naik kelas?" Ketika jawaban atas pertanyaan kedua masih lemah, maka statistik distribusi pengeluaran yang membaik tidak otomatis menghapus perasaan ketimpangan. Seorang pekerja informal, pengemudi daring, pedagang kecil, atau pegawai bergaji rendah bisa saja tidak miskin menurut garis kemiskinan, tetapi tetap merasa tertinggal karena pendapatan dan perlindungan ekonominya terlalu rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Karena pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi secara spasial

Ketimpangan yang masih terasa juga berkaitan erat dengan geografi pertumbuhan. BPS menunjukkan bahwa pada 2025 Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen. Dominasi ini tidak berarti wilayah lain tidak tumbuh, tetapi jelas menunjukkan bahwa pusat gravitasi ekonomi Indonesia masih sangat berat ke satu kawasan. Dalam negara kepulauan yang besar, konsentrasi pertumbuhan seperti ini

mempunyai implikasi sosial yang besar: akses terhadap pekerjaan formal, investasi, infrastruktur, dan pasar modern menjadi tidak merata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data kemiskinan memperkuat pembacaan ini. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan adalah 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Ini berarti bahwa bahkan ketika ketimpangan pengeluaran perdesaan terlihat lebih rendah daripada perkotaan, tingkat kesejahteraan absolut di perdesaan masih tertinggal jauh. Dengan kata lain, perdesaan bisa tampak “lebih merata” karena sama-sama hidup dalam tingkat konsumsi yang lebih rendah. Inilah salah satu alasan mengapa penurunan rasio Gini nasional belum otomatis terasa sebagai keadilan ekonomi di lapangan: disparitas spasial masih kuat, dan pengalaman kesejahteraan di luar pusat pertumbuhan tidak serta-merta membaik secepat indikator nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Karena investasi dan pekerjaan masih banyak bergerak di sektor bernilai lebih rendah

Laporan Bank Dunia juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya telah menikmati tingkat investasi yang tinggi, rata-rata di atas 30 persen dari PDB selama 15 tahun terakhir. Namun, sekitar 70 persen investasi tersebut masih mengalir ke sektor-sektor bernilai lebih rendah. Bank Dunia menilai hal ini memperlambat perpindahan tenaga kerja dari pekerjaan berkeahlian rendah, sering informal, menuju pekerjaan yang lebih produktif dan lebih berupah. Ini sangat penting untuk menjelaskan paradoks kita. Masalah Indonesia bukan ketiadaan investasi atau pertumbuhan, melainkan komposisi investasi dan pertumbuhan itu sendiri.

Bila sebagian besar investasi terserap ke sektor-sektor dengan produktivitas dan upah yang lebih rendah, maka pertumbuhan ekonomi memang dapat tetap stabil, tetapi kemampuan pertumbuhan tersebut untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata akan terbatas. Dalam situasi seperti ini, kelas menengah tidak mengembang cukup cepat, peluang kerja berkualitas tidak menyebar cukup luas, dan ketimpangan

pengalaman ekonomi tetap besar. Itulah sebabnya ketimpangan masih terasa bahkan ketika data pengeluaran membaik: struktur pertumbuhan belum cukup progresif untuk menciptakan mobilitas sosial yang kuat.

5. Karena biaya hidup masih menekan dan mengurangi rasa perbaikan

Perasaan ketimpangan juga sangat dipengaruhi biaya hidup. Pada Februari 2026, inflasi tahunan mencapai 4,76 persen, sebelum turun menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. Secara teknis, inflasi inti Maret berada di 2,52 persen, tetapi bagi rumah tangga yang penting bukan hanya rata-rata nasional, melainkan harga yang mereka temui dalam kehidupan harian—makanan, transportasi, listrik, pendidikan, dan kebutuhan rutin lain. Ketika harga-harga ini terasa naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, rumah tangga akan tetap merasa sempit walaupun statistik distribusi membaik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah rata-rata upah buruh sebesar Rp3,33 juta menjadi relevan. Bagi banyak rumah tangga, terutama di kota-kota besar dan kawasan penyangga, pendapatan sebesar itu harus menutup berbagai komponen pengeluaran yang terus naik. Maka, bahkan dengan pengangguran yang rendah dan distribusi pengeluaran yang sedikit membaik, realitas hidup sehari-hari belum tentu terasa lebih ringan. Ketimpangan “terasa di lapangan” karena perbaikan statistik belum cukup besar untuk mengubah pengalaman kas bulanan rumah tangga secara meyakinkan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6. Karena kelompok rentan di atas garis kemiskinan masih sangat besar

Data kemiskinan yang menurun sering kali menimbulkan kesan bahwa masalah kesejahteraan membaik secara luas. Padahal, garis kemiskinan hanyalah batas minimum. Di atas garis itu terdapat kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin, tetapi sangat mudah jatuh kembali bila terjadi kenaikan harga, kehilangan kerja, sakit, atau penurunan pendapatan. BPS menunjukkan bahwa masih ada 23,36 juta penduduk miskin pada

September 2025. Di luar itu, jutaan rumah tangga lain hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Inilah lapisan sosial yang kerap menjadi sumber utama perasaan ketimpangan: mereka tidak cukup miskin untuk disebut miskin, tetapi belum cukup aman untuk merasa mapan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Penjelasan Bank Dunia tentang menyusutnya pekerjaan kelas menengah memperkuat pembacaan ini. Bila porsi pekerjaan kelas menengah menurun dan pekerjaan baru banyak tercipta di sektor berpendapatan rendah, maka kelompok rentan akan bertahan besar. Rumah tangga seperti ini bisa lolos dari kategori miskin, namun tetap tidak mampu membangun tabungan, aset, atau perlindungan yang memadai. Akibatnya, perbaikan di data agregat tidak serta-merta diterjemahkan sebagai rasa aman yang lebih luas.

Ilustrasi Lapangan: Mengapa Statistik dan Pengalaman Bisa Berbeda?

Bayangkan satu rumah tangga di kota menengah di Jawa. Kepala keluarga bekerja sebagai pegawai kontrak atau karyawan toko, dengan penghasilan sedikit di atas rata-rata upah buruh nasional. Pasangannya menambah pendapatan lewat usaha kecil berbasis rumah. Keluarga ini mungkin tidak tergolong miskin menurut BPS. Mereka masih mampu makan, menyekolahkan anak, dan membayar kontrakan. Tetapi mereka hampir tidak punya ruang aman. Bila harga pangan naik, biaya sekolah bertambah, atau salah satu pendapatan menurun, seluruh anggaran rumah tangga segera tegang. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin tidak masuk kategori miskin, tetapi jelas tidak merasa setara atau aman secara ekonomi. Data distribusi pengeluaran bisa membaik, tetapi rasa ketimpangan tetap hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ilustrasi lain dapat dilihat di perdesaan. Sebuah rumah tangga tani mungkin tinggal di wilayah dengan rasio Gini yang lebih rendah, tetapi tingkat kemiskinan lebih tinggi. Mereka hidup di komunitas yang relatif “lebih setara”, tetapi dalam tingkat kesejahteraan yang sama-sama rendah. Dalam kondisi seperti itu, penurunan rasio Gini tidak otomatis dirasakan

sebagai kemajuan sosial yang besar. Yang lebih menentukan justru produktivitas lahan, harga hasil pertanian, akses jalan, biaya pupuk, dan keberadaan pekerjaan non-pertanian. Karena itu, ketimpangan dapat terasa kuat bukan hanya karena distribusi yang buruk, tetapi juga karena standar hidup absolut yang masih rendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi Kebijakan

1. Ukur keberhasilan tidak hanya dari rasio Gini, tetapi juga dari kualitas pekerjaan

Implikasi pertama adalah bahwa keberhasilan distribusi tidak boleh diukur hanya dengan rasio Gini pengeluaran. Rasio ini penting, tetapi tidak cukup. Indonesia perlu menambahkan fokus yang jauh lebih kuat pada penciptaan pekerjaan menengah dan tinggi, formalisasi kerja, serta pendapatan riil. Laporan Bank Dunia dengan jelas menunjukkan bahwa porsi pekerjaan kelas menengah menurun, hampir 60 persen pekerja masih informal, dan pekerjaan baru banyak terkonsentrasi pada sektor berupah rendah. Artinya, agenda pemerataan harus melebar dari redistribusi pengeluaran ke transformasi struktur kerja.

2. Pemerataan spasial harus diperlakukan sebagai inti kebijakan, bukan pelengkap

Karena pertumbuhan nasional masih sangat terpusat di Jawa dan kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi, maka kebijakan pembangunan wilayah harus dipandang sebagai jantung agenda pemerataan. Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga memperluas kualitas pasar tenaga kerja, konektivitas logistik, akses pendidikan, dan kesempatan usaha di luar pusat-pusat pertumbuhan utama. Jika tidak, ketimpangan akan terus terasa sebagai pengalaman geografis: sebagian wilayah hidup dalam ekonomi yang bergerak cepat, sementara wilayah lain bergerak lebih lambat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Stabilitas harga dan perlindungan biaya hidup harus menjadi bagian dari agenda pemerataan

Ketimpangan bukan hanya soal siapa mendapat berapa, tetapi juga siapa harus membayar biaya hidup berapa besar untuk bertahan. Karena itu, pengendalian inflasi—terutama inflasi yang dekat dengan kebutuhan pokok—harus dilihat sebagai kebijakan pemerataan. Bagi kelompok pendapatan bawah dan menengah bawah, sedikit kenaikan harga dapat menghapus seluruh manfaat dari perbaikan distribusi agregat. Maka, menjaga harga pangan, transportasi, dan utilitas tetap terkendali adalah cara konkret mengubah statistik yang membaik menjadi pengalaman hidup yang lebih baik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Rumah tangga rentan di atas garis kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih besar

Kebijakan sosial sering terlalu fokus pada kelompok miskin resmi. Padahal, kelompok yang sedikit di atas garis kemiskinan sangat besar dan sangat rentan. Mereka adalah kelompok yang paling mudah merasa “ketimpangan masih ada”, karena hidupnya sering tampak cukup di atas kertas tetapi sangat rapuh dalam praktik. Karena itu, agenda perlindungan sosial, jaminan kerja, kesehatan, dan pendidikan perlu lebih sensitif terhadap kelompok rentan, bukan hanya terhadap yang sudah sangat miskin. Ini penting agar perbaikan data tidak berhenti sebagai perbaikan statistik, melainkan menjadi peningkatan rasa aman ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5. Komposisi investasi perlu diubah agar pertumbuhan lebih inklusif

Bank Dunia menilai sekitar 70 persen investasi Indonesia masih mengalir ke sektor bernilai lebih rendah. Selama pola ini bertahan, pertumbuhan akan tetap kuat di angka tetapi lemah dalam mobilitas sosial. Indonesia membutuhkan investasi yang lebih banyak di manufaktur dan jasa bernilai tambah lebih tinggi, yang mampu menciptakan pekerjaan formal, produktif, dan berupah lebih baik. Pemerataan pada akhirnya bukan hanya soal membagi hasil pertumbuhan, tetapi juga soal mengubah mesin pertumbuhan itu sendiri.

Kesimpulan

Ketimpangan ekonomi Indonesia pada awal 2026 memang menurun dalam data, tetapi tetap terasa di lapangan. Kedua pernyataan itu tidak saling bertentangan. Rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363, pangsa pengeluaran 40 persen terbawah meningkat, dan kemiskinan turun menjadi 8,25 persen. Pada saat yang sama, ekonomi tumbuh 5,11 persen. Semua ini adalah perbaikan yang nyata dan penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akan tetapi, pengalaman masyarakat tidak hanya dibentuk oleh distribusi pengeluaran. Ia dibentuk juga oleh apakah pekerjaan yang tersedia cukup baik, apakah wilayah tempat tinggal memberi peluang yang sama, apakah biaya hidup masih terjangkau, dan apakah rumah tangga punya ruang aman untuk menghadapi risiko. Di titik-titik inilah Indonesia masih menghadapi persoalan besar: pekerjaan kelas menengah menyusut, informalitas tetap tinggi, investasi masih berat ke sektor bernilai rendah, kemiskinan perdesaan tetap tinggi, dan upah rata-rata masih relatif terbatas di tengah tekanan harga. Maka, wajar bila ketimpangan masih terasa meskipun statistik tertentu membaik.

Dengan demikian, pelajaran utama dari tema ini adalah bahwa Indonesia tidak hanya memerlukan pertumbuhan dan distribusi yang lebih baik di atas kertas, tetapi juga transformasi yang membuat pertumbuhan itu terasa dalam kehidupan nyata. Selama kualitas pekerjaan, biaya hidup, dan kesempatan antarwilayah belum membaik secara cukup luas, maka statistik ketimpangan yang menurun akan terus hidup berdampingan dengan pengalaman ketimpangan yang masih kuat di lapangan. Itulah inti paradoks Indonesia hari ini: masalahnya bukan tidak ada kemajuan, melainkan kemajuan itu belum cukup dalam, belum cukup merata, dan belum cukup aman untuk dirasakan sebagai keadilan ekonomi yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Rasio Gini

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Semakin tinggi nilainya, semakin timpang distribusinya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan pengeluaran

Perbedaan kemampuan konsumsi antar kelompok penduduk yang diukur dari pengeluaran rumah tangga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pangsa pengeluaran 40 persen terbawah

Bagian total pengeluaran nasional yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kemiskinan

Kondisi ketika pengeluaran per kapita penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pekerjaan kelas menengah

Pekerjaan yang menghasilkan pendapatan cukup untuk menopang standar hidup kelas menengah dan mobilitas sosial yang lebih stabil.

Informalitas

Keadaan ketika pekerja atau usaha berada di luar kerangka perlindungan dan regulasi formal, sehingga keamanan kerja dan pendapatan cenderung lebih lemah.

Good jobs

Pekerjaan yang bukan hanya tersedia, tetapi juga produktif, lebih formal, lebih aman, dan lebih memadai dari sisi pendapatan serta prospek karier.

Ketimpangan spasial

Ketimpangan yang muncul karena perbedaan kesempatan ekonomi

antarwilayah, misalnya antara Jawa dan luar Jawa atau antara kota dan desa. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Upah riil

Nilai pendapatan setelah dikoreksi oleh perubahan harga atau inflasi, yang lebih mencerminkan daya beli nyata pekerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025). *The Gini ratio in March 2025 was 0.375*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026a). *The Gini ratio in September 2025 was 0.363*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026d). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026f). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen*. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2026). *Survei Konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia.

Rudy C Tarumingkeng: Ketimpangan Ekonomi Indonesia - Menurun di Data, Namun Masih Terasa di Lapangan

World Bank. (2025). *Reforms for a formal and prosperous Indonesia*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report: Running faster, for longer*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>